



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 188/38/KPTS-DPRD/050/2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan secara terarah, terencana, terpadu, efisien, efektif, dan sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 239 ayat (3) dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : a. Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur ini.

b. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA ...

- KETIGA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- KEEMPAT** : Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah ini juga dimuat daftar kumulatif terbuka, meliputi:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- KELIMA** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam hal:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA selanjutnya dituangkan dalam perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
WAKIL KETUA,


Ttd

H. ANWAR SADAD, M.Ag.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. ANDIK FADJAR TJAHHJONO, Drs., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660917 199103 1 012

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 188 / 38 /KPTS-DPRD/050/2022
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

A. USULAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

| No | Jenis | Tentang | Status | | Pelaksanaan | Disertai | | Pengusul | Waktu Pembahasan |
|----|-------|--|--------|------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|------------------|
| | | | Baru | Ubah | | Naskah Akademik | Penjelasan atau Keterangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Perda | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing | | Ubah | 2021 s/d 2023 | | √ | Komisi A | Masa Sidang I |
| 2 | Perda | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik | | Ubah | 2022 s/d 2023 | | √ | Komisi A | Masa Sidang I |
| 3 | Perda | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | Ubah | 2021 s/d 2023 | | √ | Komisi A | Masa Sidang II |
| 4 | Perda | Keprotokolalan | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | Komisi A | Masa Sidang II |
| 5 | Perda | Perlindungan Petani Garam | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | Komisi B | Masa Sidang I |
| 6 | Perda | Kepelabuhanan | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | Komisi D | Masa Sidang I |
| 7 | Perda | Pengelolaan Pertambangan | Baru | | 2022 s/d 2023 | √ | | Komisi D | Masa Sidang III |
| 8 | Perda | Pelestarian Seni dan Budaya | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | Komisi E | Masa Sidang I |
| 9 | Perda | Penanggulangan Bencana | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | Komisi E | Masa Sidang II |
| 10 | Perda | Penyelenggaraan Keolahragaan | Baru | | 2022 s/d 2023 | √ | | Komisi E | Masa Sidang III |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------|------|---------------|---|---|------------|----------------|
| 11 | Perda | Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | Bapemperda | Masa Sidang I |
| 12 | Perda | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah | | ubah | 2022 s/d 2023 | | √ | Bapemperda | Masa Sidang II |

B. USULAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

| No | Jenis | Tentang | Status | | Pelaksanaan | Disertai | | Pengusul | Waktu Pembahasan |
|----|-------|--|--------|------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Baru | Ubah | | Naskah Akademik | Penjelasan atau Keterangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Perda | Pengelolaan Keuangan Daerah | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | BPKAD | Masa Sidang I |
| 2 | Perda | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah | | Ubah | 2022 s/d 2023 | | √ | Biro Perencanaan | Masa Sidang I |
| 3 | Perda | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal | | Ubah | 2021 s/d 2023 | | √ | DPMP/PTSP | Masa Sidang I |
| 4 | Perda | Pengelolaan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | Dinas Kehutanan | Masa Sidang I |
| 5 | Perda | Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan di Jawa Timur | | Ubah | 2021 s/d 2023 | √ | | Biro Perencanaan | Masa Sidang I |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--|------|--|---------------|---|---|-----------|-----------------|
| 6 | Perda | Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 | Baru | | 2021 s/d 2023 | √ | | DPRKPKCK | Masa Sidang I |
| 7 | Perda | Satu Data | Baru | | 2022 s/d 2023 | √ | | Diskoinfo | Masa Sidang I |
| 8 | Perda | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Baru | | 2022 s/d 2023 | √ | | Bapenda | Masa Sidang I |
| 9 | Perda | Perubahan Ketjujuh Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal | Baru | | 2022 s/d 2023 | √ | | Bapenda | Masa Sidang I |
| 10 | Perda | Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 | Baru | | 2023 | | √ | BPKAD | Masa Sidang II |
| 11 | Perda | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 | Baru | | 2023 | | √ | BPKAD | Masa Sidang II |
| 12 | Perda | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 | Baru | | 2023 | | √ | BPKAD | Masa Sidang III |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
WAKIL KETUA,

Ttd

H. ANWAR SADAD, M.Ag.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660917 199103 1 012